

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, perusahaan bersaing ketat satu sama lain yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Salah satu unsur yang dapat menentukan baik buruknya kinerja suatu lembaga atau instansi adalah teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk menunjang kegiatan perusahaan yang efisien. Teknologi informasi diyakini dapat memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat. Salah satu informasi yang sangat penting dan dibutuhkan di sebuah perusahaan adalah informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi salah satu elemen yang sangat dibutuhkan di perusahaan. Sistem informasi akuntansi ini dirancang untuk mencatat, menyimpan, memproses, dan menyajikan sebuah informasi yang akan digunakan pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Sistem informasi akuntansi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan sumber daya manusia yang berkompetensi yang bisa menggunakan suatu sistem. Sistem informasi ini juga dirancang untuk dapat menyajikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan adalah sebuah gambaran dari kondisi keuangan suatu organisasi atau entitas. Baik dan buruknya suatu instansi dapat dilihat dari kondisi catatan keuangan organisasi tersebut. Menurut laporan Ikatan Akuntan Indonesia 2015, laporan keuangan memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan

dan kinerja organisasi. Tujuan mendasar dari laporan keuangan adalah untuk memberikan sebagian besar pemangku kepentingan data tentang keadaan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas masuk dan keluar yang dapat mereka gunakan untuk membuat keputusan tentang perekonomian.

Laporan keuangan yang memiliki kualitas sangat penting dan dibutuhkan karena dapat memberikan dampak besar pada organisasi. Informasi yang tertuang dalam laporan keuangan merupakan sumber informasi penting yang berfungsi sebagai panduan bagi pengguna dalam membuat keputusan yang tepat. Jika laporan keuangan disajikan dengan kualitas yang kurang optimal, perusahaan dapat menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan, sementara investor akan memiliki keraguan dan perusahaan dapat mengalami kerusakan reputasi, sehingga menghambat pembentukan kepercayaan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Laporan keuangan adalah catatan yang tertata rapi dan menyeluruh tentang kegiatan dan transaksi keuangan organisasi pelapor, berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai tolak ukur stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibagi menjadi tujuh bagian: catatan atas laporan keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, realisasi kelebihan anggaran, laporan operasional, dan laporan neraca. Dengan kata lain, laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kegiatan dan kewajiban suatu instansi pada waktu tertentu.

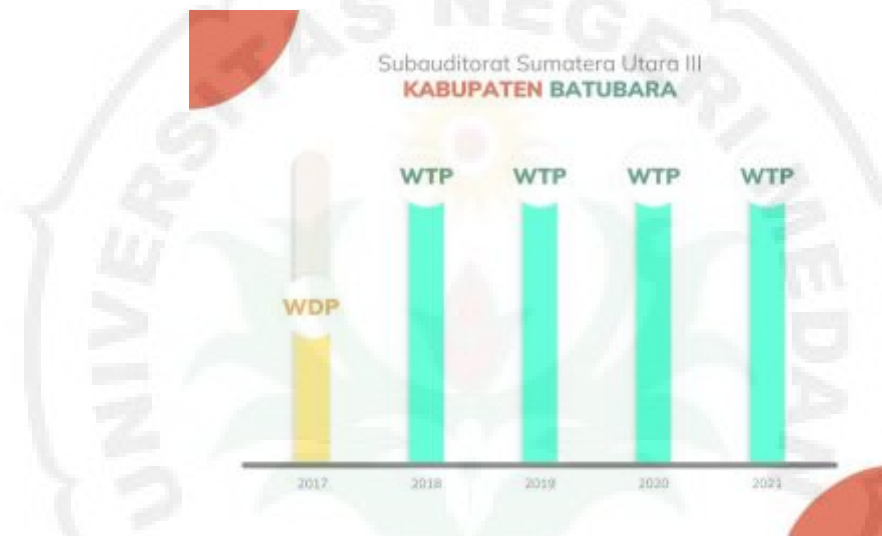
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan berkualitas jika dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh perusahaan. Kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa standar kualitatif, termasuk relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan mendapatkan hasil evaluasi berupa opini (pendapat) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap periode. BPK dapat memberikan empat pendapat berbeda: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Setiap opini yang dikeluarkan oleh BPK telah sesuai dengan kriteria penilaian, seperti salah saji material, sistem pengendalian internal telah memadai, dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat dari 58% (313 LKPD) pada tahun 2015 menjadi 82% (443 LKPD) pada tahun 2018 (Humas BPK bersumber dari BPK RI, 2019).

Fenomena terkini yang terjadi sesuai dengan informasi yang bersumber dari babe.antarnews.com pada 23 September 2022 Menkopulhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) yaitu Mahfud MD mengungkapkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum menjamin suatu instansi bebas dari kasus korupsi. Dia juga menambahkan status opini Wajar

Tanpa Pengecualian itu sesungguhnya merupakan transaksi yang diinput ke dalam laporan keuangan telah sesuai.

Berikut adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Batu Bara



(Sumber : BPK-RI melalui publikasi sumut.bpk.go.id)

Gambar 1. 1
Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2021 memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan ketidakakuratan laporan keuangan pada saat itu, sistem pengendalian internal yang memadai, dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan akuntansi pemerintah (SAP). Namun fenomena yang terjadi di lapangan adalah BPK melihat adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya dalam penyusunan laporannya, terbukti dengan ikhtisar hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 dan 2020 yang dapat dilihat di www.batubara.go.id. Kelemahan tersebut antara lain bagian pajak dan retribusi daerah yang belum disalurkan kepada

pemerintah desa, klasifikasi anggaran dan realisasi belanja yang tidak tepat, serta penata usahaan dan pengamanan aset tetap belum optimal. Ini menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang telah disajikan tersebut tidak relevan dalam pelaksanaannya. Salah satu syarat agar laporan keuangan dikatakan berkualitas adalah memiliki informasi yang relevan. Relevansi dalam laporan keuangan sangat berguna untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan dan membantu dalam penilaian kinerja mereka. Berdasarkan dari temuan BPK, laporan keuangan OPD Batu Bara belum memenuhi syarat tersebut, sehingga bisa dikatakan OPD Batu Bara belum memiliki kualitas dari laporan keuangan. Selain itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi langsung di OPD Kabupaten Batu Bara, saat ini OPD Kabupaten Batu Bara telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencatatan laporan keuangannya. Akan tetapi, ada beberapa OPD Kabupaten Batu Bara yang pegawai bagian akuntansinya justru bukan yang ahli di bidang tersebut, salah satunya adalah OPD Dinas Pertanian. Mereka harus belajar secara otodidak dan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Kabupaten. Hal ini memungkinkan akan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu kesalahan salah saji.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Keberadaan Sistem Informasi Akuntansi yang akurat, relevan, dan juga lengkap akan menjadikan sebuah

laporan keuangan berkualitas jika didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat mempermudah aksesibilitas proses pelaporan keuangan bagi penggunanya. Sistem informasi akuntansi memfasilitasi akses organisasi ke data keuangan, yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Sejalan dengan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal merupakan faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap berkualitasnya sebuah laporan keuangan. Pengelolaan, pengarahan, dan evaluasi sumber daya organisasi adalah tujuan dari sistem pengendalian internal. Selain itu, sistem pengendalian internal juga mampu menemukan dan mengungkap segala bentuk kecurangan. Kelemahan sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi atau instansi dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan ketidakakuratan dalam pelaporan laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia juga yang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Peran penting kompetensi sumber daya manusia yaitu untuk merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang memiliki kualitas, sebuah organisasi atau perusahaan tentu memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki kompeten juga dan bisa mengoperasikan sistem informasi yang semakin canggih saat ini. Jika sumber daya manusia gagal dalam menyusun laporan keuangan, maka akan sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Fenomena yang kerap kali ditemukan pada sebuah instansi pemerintahan adalah kekurangan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi

informasi, hal ini tentu berdampak pada kinerja mereka. Akan tetapi, melalui Badan pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Kabupaten Batu Bara melakukan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan skill para kepala OPD di bidang kepemimpinan, sehingga SDM yang memiliki kualitas dan berkompoten akan meningkat (Sumber : www.ladangberita.id). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengupayakan agar kapasitas sumber daya manusia dapat meningkat.

Berdasarkan pada penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi menyimpulkan SIA memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Adji, 2021). Penelitian selanjutnya yaitu mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Laporan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan (Oktavia, 2019).

Penelitian dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa Sumber daya Manusia dan Teknologi Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan (Rehana, 2022). Selanjutnya penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Gasperz 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arza Oktriana (2021) menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Sedangkan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Menurut Aisyah (2022) menunjukkan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan variabel kompetensi staf akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Emperis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. BPK melihat ada kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan daerah.

2. Beberapa pegawai yang bekerja di bagian akuntansi justru bukan yang ahli di bidang tersebut, yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penyusunan laporan keuangan.
3. Lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pada instansi pemerintahan yang memicu terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.
4. Sistem informasi akuntansi akan mempengaruhi bagaimana laporan keuangan disajikan jika didukung oleh sumber daya manusia yang berpengetahuan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai untuk digunakan oleh instansi pemerintah.
5. BPK menemukan penyimpangan sistem pengendalian intern dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempertahankan ruang lingkup yang terarah dan terkendali, penelitian ini dibatasi pada masalah tentang dampak penggunaan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai :

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang dampak penggunaan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan

keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk meninjau dan menguji kembali studi yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang sistem informasi keuangan. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai syarat untuk pencapaian gelar sarjana.

b. Bagi Pemerintah

Temuan studi ini diharapkan dapat menjadi acuan mendasar bagi pengambilan keputusan terkait pembentukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi serta sebagai media untuk menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai tentang penelitian ini.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian selanjutnya mengenai hal ini dapat mengacu pada temuan penelitian ini sebagai sumber informasi.